

Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan Di Indonesia

Candra Ayu*, Hayati

Doktor Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Email: ayucandra22@unram.ac.id*

ABSTRAK

Potensi sumberdaya alam Indonesia sangat memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan basis utama pembangunan sektor pertanian. Namun, implementasi kebijakan untuk mendukung pembangunan sektor pertanian belum signifikan berdampak mensejahterakan petani dan masyarakat perdesaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui jenis-jenis kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan di Indonesia serta implementasinya. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Tujuh jenis kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia dari hasil penelitian ini adalah Kebijakan Peningkatan Produksi, Kebijakan Subsidi, Kebijakan Diversifikasi, Kebijakan Penguatan Kelembagaan dan Penyuluhan, Kebijakan Pengembangan Infrastruktur, Kebijakan Perlindungan dan Mitigasi Risiko serta Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Daya Saing. Implementasi kebijakan pembangunan pertanian belum efektif, serta belum terfokus dan tidak konsisten pada reformasi agraria dalam mengatasi kemiskinan petani yang umumnya bermukim di wilayah pedesaan. Selain itu, implementasi kebijakan belum bersirnergis dengan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi dan pembangunan pedesaan. Diharapkan hasil analisis ini menjadi dasar penetapan kebijakan pembangunan pertanian yang menjamin keberlanjutan sistem produksi pertanian sekaligus mensejahterakan masyarakat petani di wilayah pedesaan secara berkelanjutan.

Katakunci: Kebijakan; Pembangunan Pertanian; Pedesaan; Pembangunan Ekonomi; Kesejahteraan

ABSTRACT

Indonesia's natural resource potential is sufficient to support economic growth, primarily based on agricultural development. However, the implementation of policies to support agricultural development has not significantly impacted the welfare of farmers and rural communities. This study aims to determine the types of agricultural and rural development policies in Indonesia and their implementation. The research method is descriptive qualitative with a literature study approach. Seven types of agricultural development policies in Indonesia from this study are Production Increase Policy, Subsidy Policy, Diversification Policy, Institutional Strengthening and Extension Policy, Infrastructure Development Policy, Risk Protection and Mitigation Policy, and Export Enhancement and Competitiveness Policy. The implementation of agricultural development policies has not been effective, and is not focused and consistent in agrarian reform to address poverty among farmers who generally live in rural areas. Furthermore, policy implementation has not been synergistic with various economic and rural development policies. It is hoped that the results of this analysis will serve as a basis for establishing agricultural development policies that ensure the sustainability of agricultural production systems while simultaneously improving the welfare of farming communities in rural areas.

Keywords: Policy; Agricultural Development; Rural; Economic Development; Welfare

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pertanian dan pedesaan memegang peran utama dalam pembangunan negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini dibuktikan dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama periode tahun 2010 – 2024 rata-rata sebesar 68.202,90 Miliar IDR. Kontribusi sektor pertanian tahun 2024 sebesar 32.708,90 Miliar IDR (Tranding Economics. 2025). Selain itu, sektor pertanian di Indonesia memiliki peran strategis lain, yakni memproduksi bahan pangan dan bahan baku untuk sektor lainnya terutama sektor industri, serta menyerap tenaga kerja terbanyak. Hal ini dimungkinkan karena aktifitas sektor pertanian mencakup sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, sub sektor perikanan, sub sektor perternakan, sub sektor perkebunan serta sub sektor kehutanan (Syam dan Noekman, 2003: BPS, 2024). Dengan demikian, pembangunan sektor pertanian dapat secara signifikan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia (Putri, 2024).

Pergeseran peran sektor pertanian terjadi selama dekade 1960 -1970-an, dari penghasil pangan dan bahan baku industri serta penyerap tenaga kerja menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Melalui adopsi inovasi dan teknologi dapat mentrasformasikan sektor pertanian menjadi sektor modern yang produktif dan memberikan efek pengganda kepada sektor non-pertanian (Dumasari, 2020). Hazell et al. (1991) mengungkapkan juga bahwa peningkatan produktivitas sektor pertanian berdampak mendorong pertumbuhan sektor non-pertanian di perdesaan, khususnya jika sudah terdapat infrastruktur dan iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian maka pembangunan sektor pertanian diintegrasikan dengan pembangunan perdesaan dan kegiatan off-farm lainnya (integrated rural-development), untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat pertanian dan perdesaan.

Sektor pertanian tetap sebagai penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sebesar 13,5 %, dan menjadi penyedia lapangan kerja bagi lebih dari 30% tenaga kerja nasional. Namun, kontribusinya menurun diantaranya akibat rendahnya nilai tambah produk pertanian dan terbatasnya akses pasar untuk petani kecil (Badan Pusat Statistik 2023). Bersamaan dengan itu, ketergantungan terhadap pangan impor semakin meningkat dan ini akibat terjadi kelemahan dalam sistem produksi pangan dalam negeri. Impor produk pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan petani (Harahap et al., 2022). Faktor perubahan iklim dengan fluktuasi cuaca yang ekstrim serta bencana kekeringan dan banjir, menyebabkan ketidakpastian hasil panen dan menjadi kendala upaya peningkatan produktivitas pertanian. Selain itu, pengembangan sistem pertanian konvensional yang intensif input kimiawi menjadi tantangan tercapainya ketahanan pangan dan tidak berkelanjutannya sistem pertanian (FAO, 2022).

Sektor pertanian berperan strategis dalam perekonomian nasional. Sekitar 45 % penduduk Indonesia bekerja di sektor ini dan menjadikannya sebagai sumber utama pendapatan bagi masyarakat di pedesaan. Namun, berbagai hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar petani di Indonesia merupakan petani berlahan sempit dan cenderung rawan mengalami kemiskinan. Kegiatan konversi lahan pertanian untuk mendukung pembangunan ekonomi dan perluasan pemukiman berkibat mengurangi luas lahan pertanian yang tersedia, dan menambah jumlah petani kecil dan petani tanpa lahan serta meningkatkan pengangguran dan kemiskinan di perdesaan(Ayu dkk, 2024). Kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan sektor pertanian, sedangkan pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Berbagai tantangan dan permasalahan yang terdapat dalam sistem pertanian tersebut maka diperlukan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian. Kebijakan pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan, meningkat

kesejahteraan petani melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan keberlanjutan sistem produksi pertanian yang berdaya saing serta menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan stabilitas ekologi.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia, jenis-jenis kebijakan pembangunan pertanian, tantangan dalam mengimplementasikan dan evaluasi efektifitas pencapaian tujuan kebijakan. Hasil analisis ini diharapkan berguna sebagai dasar pengambilan kebijakan di sektor pertanian yang berpotensi besar menjamin keberlanjutan sistem produksi pertanian dan kesejahteraan petani sebagai tombak pelaksana aktivitas pertanian di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan studi literatur (Sugiyono, 2021) dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data/informasi dari sumber literatur, yakni dari buku, artikel hasil penelitian, data sekunder dari dinas/instansi yang relevan serta dokumen-dokumen lainnya yang resmi. Studi literatur dilakukan dengan menganalisis sumber primer dan sekunder dalam bentuk artikel ilmiah dengan basis data GOOGLE SCHOLAR (diakses di <https://scholar.google.com/>); ScienceDirect (diakses di <https://www.sciencedirect.com/>), dan Frontiers (diakses di <https://www.frontiersin.org/>); serta jurnal terakreditasi Ristekdikti (jurnal Sinta), buku-buku referensi, Tahap-tahap analisis data penelitian meliputi tahap pengumpulan data, evaluasi dan seleksi berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian, kredibilitas dan mutu berstandar akademis tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Pembangunan Pertanian di Indonesia

Pembangunan pertanian di Indonesia pada awal kemerdekaan memiliki paradigma berdasarkan “Perencanaan Pembangunan Pertanian Tiga Tahun” yang dikenal dengan istilah “Plan Kasimo”. Pembangunan pertanian di era tersebut dilaksanakan dalam gejolak politik sehingga tidak efektif. Pasca pemberontakan “G30SPKI” di tahun 1965, pemerintah berupaya memulihkan aktivitas pembangunan nasional melalui Program Tri Logi Pembangunan dengan suatu penetapan prioritas pembangunan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan (Dumasari, 2020).

Paradigma pembangunan pertanian di Indonesia selanjutnya mengikuti paradigma pembangunan ekonomi yang sejak tahun 1970-an bersifat kapitalistik, bertumpu pada modal besar. Sektor pertanian berubah perannya, sebelumnya sebagai fondasi ekonomi nasional menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi dan menjadi elemen pendukung industrialisasi. Pembangunan pertanian pada era pemerintahan Orde Baru (Orba) dilakukan dengan pendekatan *by-pass approach* (jalan pintas), yakni bagaimana agar sektor pertanian mendongkrak akselerasi peningkatan produksi pangan nasional yang mendukung stabilitas politik melalui pengembangan program Revolusi Hijau. Kebijakan tersebut merupakan solusi strategis yang bertolak belakang dengan program *land reform* di awal kemerdekaan pada masa Pemerintahan Orde Lama. Pelaksanaan revolusi hijau oleh pemerintahan Orba dilakukan tanpa reformasi agraria. Harapan masyarakat terhadap program tersebut dapat memulihkan perekonomian secara signifikan, namun diperlukan strategi kebijakan yang menjamin diseminasi efektif program agar tidak menjadi program kontra-produktif (Azizah, 2009). Dampak program tersebut mengikis budaya politik

pedesaan yang berbasis nilai lokal menjadi model modernisasi politik modern serta menggantikan tradisi gotong royong dengan sistem kapitalisme dan industrialisasi pertanian (Fakih, 2004).

Dengan perkembangan paradigma tersebut maka kebijakan pembangunan pedesaan di Indonesia juga berkembang. Dimulai dengan kebijakan land reform pada tahun 1960-an, kemudian Revolusi Hijau, Program Desa Tertinggal pada tahun 1990-an, Program Pengembangan Kecamatan pada tahun 2000-an, dan Program Perlindungan Sosial dilaksanakan setelahnya. Program-program tersebut berdampak positif terhadap penghidupan masyarakat pedesaan, tetapi sebagian besar belum sepenuhnya berhasil (Sutiyo dan Maharjan, 2017).

Paradigma pertanian berkelanjutan merupakan paradigma baru pembangunan pertanian di Indonesia. Paradigma ini dipandang sebagai konsep ideal yang berdampak mensejahterakan petani sekaligus menguatkan peran sektor pertanian sebagai sektor utama dalam penerimaan devisa negara. Pengertian pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya pada usaha pertanian yang mampu mencukupi kebutuhan manusia saat ini dan tetap berkelanjutan mampu memenuhi kebutuhan generasi di masa yang akan datang. Esensi Pertanian berkelanjutan cukup penting dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) karena pembangunan pertanian terkait dengan upaya meniadakan kemiskinan, kelaparan, menjaga konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta adaptasi perubahan iklim (FAO, 2015). Keberlanjutan sistem pertanian lebih dimungkinkan terjadi karena pendekatan pengembangannya mempertimbangkan keseimbangan dan keberlanjutan aspek ekologi/lingkungan, aspek ekonomi serta aspek sosial. Dalam praktiknya antara lain usahatani terpadu, sistem pertanian campuran, sistem pertanian organik dan pertanian presisi dengan tujuan mengurangi dampak negatif dan meningkatkan efisiensi ekonomi sehingga terjadi keberlanjutan peningkatan kesejahteraan petani (Achmad et al., 2021; Toansiba dkk., 2021; Untari, 2007).

Keterkaitan Pembangunan Pertanian dan Pembangunan Pedesaan

Pertanian merupakan salah satu kegiatan ekonomi terbesar dan paling penting. Sektor pertanian menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 80% penduduk pedesaan sehingga berperan penting dalam ekonomi global. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2018 sebesar 4% dari produk domestik bruto (PDB) global dan berkontribusi 25 % di beberapa negara berkembang (Bank Dunia, 2021). Kemiskinan ekstrem yang banyak terjadi di negara berkembang sangat efektif dikurangi melalui pembangunan pertanian. Pertumbuhan sektor pertanian memberi dampak sebesar 2 sampai 3 kali lebih efektif mengurangi kemiskinan dibandingkan sektor lain, menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan berpotensi menciptakan jutaan lapangan pekerjaan lainnya di seluruh rantai pasokan, memperbaiki kualitas kesehatan dan kesejahteraan serta memberdayakan wirausahawan. Selain itu, pertumbuhan sektor pertanian berpeluang besar mengurangi hampir sepertiga emisi gas rumah kaca dunia (World Bank, 2025).

Pertanian merupakan sektor yang terintegrasi kuat dengan masyarakat di pedesaan agraris termasuk di Indonesia. Sebanyak 43% penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan dan sekitar 29% bekerja di sektor pertanian. Integrasi kuat sektor ini juga ditunjukkan dari besarnya produksi pertanian primer serta peran perusahaan agribisnis, bergerak di bidang sarana produksi, pengolahan, perdagangan, dan jasa logistik pertanian, serta usaha eceran dan grosir pangan mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan di sektor manufaktur dan jasa. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan produk agro-industri yang terus meningkat, terutama di tengah ancaman kerawanan pangan (World Bank, 2022).

Pembangunan pertanian merupakan dasar dan pendorong utama bagi pembangunan pedesaan, karena (Dumasari, 2020; Waridin, 2019):

- a. Pertanian menjadi sumber mata pencaharian utama bagi penduduk pedesaan dan berperan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan. Peningkatan produktivitas pertanian akan secara langsung meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan di desa.
- b. Pembangunan sektor pertanian akan mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan karena berdampak membuka lapangan kerja baru di luar pertanian, terutama usaha untuk kelancaran arus input dan output dari eilaya perdesaan ke lokasi konsumen yang umumnya di luar wilayah tersebut.
- c. Pembangunan pertanian bertujuan meningkatkan produksi dan pendapatan petani sehingga tingkat ketahanan pangan dan kualitas kesehatan masyarakat petani meningkat karena akses yang lebih baik terhadap makanan dari kualitas, kuantitas dan kesesuaian waktu tersedianya pangan tersebut.
- d. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera secara berkelanjutan mulai dari tingkat terkecil di wilayah perdesaan sampai bertaraf nasional melalui pengembangan sistem pertanian berkelanjutan. Karena praktiknya akan mengurangi biaya produksi, meningkatkan ketahanan ekologi dan penyediaan jasa ekosistem secara berkelanjutan.

Jenis-Jenis Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di Indonesia

Pembangunan pertanian di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang bersumber dari faktor internal (domestik) dan faktor eksternal. Tantangan internalnya termasuk keterbatasan terbatas sumber daya alam, kurangnya akses terhadap modal terutama bagi masyarakat petani kelas menengah dan -petani kecil, perubahan iklim global, dominasi usahatani skala kecil, proporsi kehilangan hasil panen yang tinggi, rendahnya mekanisasi pertanian dan kurangnya regenerasi petani serta alih fungsi lahan pertanian (Nangameka, 2012; Policy Brief, 2019). Masalah-masalah dalam sektor pertanian lainnya adalah rendahnya produktivitas pertanian dan pendapatan petani, lemahnya akses petani terhadap permodalan dan informasi strategis terkait perubahan iklim, penggunaan teknologi dan informasi pasar, rendahnya kualitas dan daya saing produk pertanian, degradasi lahan akibat penggunaan input kimiawi dalam jangka panjang dan masalah alih fungsi lahan pertanian terutama yang berdekatan dengan kawasan pemukiman (Waridin, 2019; Damanhuri dkk, 2023). Kebijakan pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang disusun pemerintah untuk merespons dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi sektor pertanian. Tantangan ini secara langsung mempengaruhi arah, isi dan efektivitas kebijakan pembangunan pertanian. Kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan dirumuskan untuk mengatasi masalah dan tantangan dalam pembangunan pertanian (Nangameka, 2012; Policy Brief, 2019).

Kebijakan pertanian merupakan suatu serangkaian tindakan yang ditentukan dan dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan suatu tujuan, diantaranya adalah untuk memajukan pertanian, meningkatkan produktivitas dan efisiennya serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi pendapatan. Agar terlaksana pembangunan pertanian sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi keputusan produsen, konsumen, dan para pelaku pemasaran. Menurut Carl Friedrich dalam Meutia (2017), kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian, maka

kebijakan menjadi suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan tindakan secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Rangkaian kegiatan dalam kebijakan pembangunan pertanian dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan produksi dan dicapainya ketahanan pangan. Tujuan akhir kebijakan pembangunan pertanian adalah agar pertanian menjadi lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan. Adapun jenis kebijakan pembangunan pertanian sebagai berikut (Hanafi, 2010; Waridin, 2019):

1. Kebijakan Peningkatan Produksi, merupakan kebijakan yang difokuskan oleh pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, terutama padi dan jagung. Implementasinya dilakukan dengan program Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, Rehabilitasi dan Mekanisasi di sektor pertanian.
2. Kebijakan Subsidi. Pada kebijakan ini sebagian harga ditanggung oleh pemerintah, terdiri dari dua jenis kebijakan, yakni:
 - a. Kebijakan untuk subsidi harga produksi pertanian, tujuannya untuk melindungi petani sebagai konsumen di dalam negeri. Petani mendapat harga yang lebih rendah dari harga pokok/biaya produksi atau dari harga internasionalnya. Dalam subsidi harga produksi diantaranya subsidi harga untuk produksi tanaman pangan pokok (beras).
 - b. Subsidi Harga faktor produksi bertujuan untuk melindungi produsen. Produksi dalam negeri dan dilakukan untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Bentuk subsidi harga faktor produksi dapat berupa biaya angkut faktor produksi ke pelosok atau perbedaan tingkat bunga bank dalam pengambilan kredit.
3. Kebijakan Diversifikasi, yakni suatu kebijakan yang mendorong petani tidak hanya bergantung pada satu komoditas, sehingga risiko kegagalan panen dapat diminimalkan dan pendapatan petani lebih stabil. Diversifikasi menurut Wahyuningsih (2008) juga mencakup pengembangan komoditas baru dan pengolahan hasil pertanian. Diversifikasi pertanian sangat penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi pedesaan dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Dalam Pembangunan pertanian, diversifikasi, umumnya dihubungkan dengan suatu peralihan atau perpindahan dari komoditas ekspor ke arah pengusahaan komoditas baru sesuai permintaan pasar. Diversifikasi pertanian adalah pemilihan dan adopsi dari beberapa tipe komoditas tambahan yang berorientasi pasar, untuk dihasilkan melalui budidaya pertanian secara modern, baik pada tingkat nasional maupun regional. Untuk menjamin keberhasilan pengembangan diversifikasi pertanian, senantiasa diperlukan adanya pengembangan teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan petani, pengembangan kelembagaan, peningkatan kualitas sumberdaya pertanian, perbaikan gizi masyarakat, perbaikan sistem pemasaran dan perlu adanya campur tangan pemerintah.
4. Kebijakan Penguatan Kelembagaan dan Penyuluhan. Pihak pemerintah melakukan penguatan kelompok tani dan penyuluhan pertanian serta membina dan mendampingi agar mandiri dan profesional..
5. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur, dilakukan dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas pasca panen sangat penting untuk mendukung kelancaran produksi, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian
6. Kebijakan Perlindungan dan Mitigasi Risiko, terutama terkait dengan pengendalian hama dan penyakit tanaman, asuransi pertanian, serta pengamanan produksi untuk mengurangi kerugian akibat bencana alam atau gangguan lainnya.

7. Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Daya Saing. Kebijakan ini dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas, perluasan pasar dan meningkatkan daya saing produk sampai ke pasar internasional.

Kebijakan pembangunan pertanian sangat berkaitan dan saling melengkapi dengan kebijakan pembangunan pedesaan. Kebijakan pembangunan pedesaan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, keterkaitan desa-kota, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan daya saing masyarakat desa dan petani di Indonesia. Jenis-Jenis Kebijakan Pembangunan Pedesaan di Indonesia (Waridin 2019):

- a. Pembangunan Infrastruktur Desa, seperti jalan, irigasi, listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mendukung aktivitas ekonomi lokal.
- b. Pengembangan Ekonomi Lokal, dilakukan dengan menndorong potensi ekonomi desa melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan BUMDes, serta pengembangan produk unggulan desa untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- c. Pemberdayaan Masyarakat
- d. Penguatan Kelembagaan Desa, antara lain dengan penguatan peran pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan desa agar tata kelola pemerintahan desa lebih efektif dan partisipatif
- e. Pengembangan Keterkaitan Desa-Kota
- f. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Implikasi Kebijakan yang Diperlukan

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program pendukung pembangunan pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan perbaikan kualitas kesejahteraan ekonomi petani. Namun, kelemahan yang mendasar sektor pertanian sampai saat ini adalah tingginya ketergantungan terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama impor pangan. Produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan termasuk rendah. Penyebabnya diantaranya adalah masih banyak petani yang sebagian besar merupakan petani bermodal sedikit, berlahan sempit dan kurang sejahtera menggunakan metode tradisional yang jika saat ini digunakan kurang efisien dan produktif (Lestari, 2022).

Beberapa permasalahan pokok yang terjadi dalam mengimplementasi kebijakan pembangunan pertanian (Simatupang dan Syafa'at (2000) mencakup:

- a. Kebijakan perdagangan dan penetapan harga. Merupakan kebijakan yang paling umum yang ditujukan sebagai pendorong dan pengendali arah pembangunan ekonomi.
- b. Kebijakan fiskal. Kebijakan ini berdasarkan alokasi anggaran pembangunan pemerintah yang tetapkan melalui keputusan politik, namun implementasinya menurunkan laju pembangunan pertanian sebesar 10 % pada periode tahun 1994-1996.
- c. Kebijakan perbankan. Kebijakan ini tidak efektif mendukung strategi pembangunan yang prioritasnya sektor pertanian.
- d. Penanaman modal swasta baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). kebijakan pemerintah terkait investasi kurang mendukung strategi pembangunan yang menetapkan sektor pertanian sebagai prioritas utama.

e. Kebijakan industri kecil untuk modernisasi. Masih dipertanyakan apakah benar transformasi ekonomi negara dari negara agraris menjadi negara industri dapat dicapai dan diawali dengan pengembangan industri kecil yang secara bertahap menjadi industri besar berskala nasional.

Proses modernisasi pertanian dalam revolusi hijau berdampak negatif pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat tani, termasuk marginalisasi wanita tani dan hilangnya budaya gotong royong. Modernisasi pertanian menghilangkan sistem pembagian kerja berdasarkan gender, ketergantungan terhadap industri, terkikisnya budaya gotong royong, melemahnya fungsi kelembagaan lokal, petani hanya sebagai objek penyuluhan, dan menurunnya minat generasi muda untuk bertani (Prayoga et al., 2019). Penurunan jumlah petani muda secara signifikan berpotensi mengancam keberlangsungan sektor pertanian. Penyebab utamanya adalah kurang prestisiusnya citra pertanian serta faktor tingginya risiko dan ketidakpastian, dalam mengelola usaha berbasis pertanian. Fenomena semakin berkurangnya jumlah petani muda di Indonesia semakin meningkat dan sektor pertanian mengalami kekurangan tenaga kerja. Fenomena ini juga terjadi di negara-negara lain di Asia, Eropa, dan Amerika. Penyebabnya antara lain terkait dengan kurang prestisiusnya bekerja di sektor pertanian, ketergantungan pada iklim yang tinggi sehingga rentan mengalami kegagalan produksi, serta flutuasi harga yang tinggi. Kondisi tersebut kurang menjamin tingkat, stabilitas, dan kontinyuitas pendapatan. Selain itu belum ada kebijakan insentif khusus untuk menarik minat petani muda/pemula agar berprofesi sebagai petani (Susilowati, 2016).

Berbagai penelitian menguraikan kerangka kerja, tantangan, dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun kebijakan pertanian yang berdampak mensejahterakan petani, meningkatkan ketahanan pangan dan melindungi kelestarian sumberdaya pertanian. Kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan sektor pertanian. Implikasi kebijakan pembangunan di Indonesia yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan khusus dalam menghadapi perubahan iklim untuk mendukung peningkatan produksi padi karena lambatnya laju peningkatan produktivitas. Umumnya peningkatan produksi padi sebagai akibat peningkatan areal penanaman. Ketergantungan terhadap iklim sangat menentukan keberhasilan produksi karena ketika terjadi perubahan iklim yang ekstrim maka diperlukan kebijakan khusus untuk antisipasi, diantaranya teknologi penanggulangan kekeringan.
- b. Kebijakan hilirisasi produk jagung sangat penting untuk mendukung misi menjadi lumbung pangan dunia. Hal ini relevan dengan orientasi pengembangan komoditas pertanian termasuk jagung berbasis industrialisasi agar memberi nilai tambah bagi produsen.
- c. Kebijakan harga untuk mendukung pencapaian swasembada kedelai. Perlu Kebijakan harga pembelian pemerintah (melalui peran aktif Bulog), penetapan tarif impor kedelai minimal sebesar 10 %.
- d. Diperlukan kebijakan untuk mengatur perencanaan penanaman cabai dan bawang merah yang didasarkan pada dinamika permintaan pasar. Hal ini terkait dengan ketepatan perencanaan penanaman, inovasi teknologi untuk penggunaan benih unggul lokal dan hibrida tersertifikasi, aplikasi teknologi pemupukan lengkap berimbang, adopsi pupuk organik, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta penanganan pasca panen yang efektif.
- e. Diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan daya saing komoditas lada dan kopi melalui perluasan areal tanam, penggunaan teknologi rekomendasi, peningkatan peran kelembagaan yang mendukung kepentingan petani

f. Kebijakan subsidi pupuk ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan petani tidak sepenuhnya dapat diwujudkan. Diperlukan kebijakan lainnya terkait kemudahan akses petani terhadap infrastruktur dan sarana produksi lain di wilayah desanya, termasuk perbaikan sistem penyaluran dan pengawasannya dilapangan.

Kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia harus mempertimbangkan: (1) pembangunan sektor pertanian dan perdesaan yang terfokus dan konsisten, (2) peningkatan kesejahteraan petani, terutama petani tanaman pangan yang umumnya berlahan yang sempit, karena itu diperlukan reformasi agraria untuk penataan struktur penguasaan dan kepemilikan lahan usahatani sebagai strategi dasar dalam pembangunan pertanian, dan (3) diperlukan kebijakan untuk mewujudkan ketersedian produk pertanian khususnya bahan pangan, agar tercapai kemandirian pangan. Hal ini dapat diwujudkan melalui subsidi input-output secara konsisten dan berkesinambungan serta pengembangan teknologi. Selain itu, Pemerintah perlu untuk menyediakan berbagai insentif yang menguntungkan petani dan melakukan proteksi terhadap produk-produk pertanian yang penting melalui kebijakan tarif impor yang konsisten dengan upaya pencapaian kemandirian pangan nasional. Diperlukan kebijakan dan berbagai program pendukung untuk memudahkan aksesibilitas petani terhadap infrastruktur dan aspek pendukung lainnya seperti pembangunan dan perbaikan sarana prasarana irigasi, jalan, pasar, fasilitasi perkreditan, dan penyuluhan pertanian. Instrumen yang dimiliki Pemerintah misalnya di bidang fiskal, moneter, dan administrasi aparatur negara perlu terus dioptimalkan bagi pembangunan pertanian dalam arti luas.

KESIMPULAN

Indonesia memiliki sumber daya alam yang memadai untuk menjadikan pertanian sebagai sektor utama pembangunan ekonomi nasional. Namun, kebijakan makro di sektor pertanian belum efektif memberikan arah, strategi, dan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan. Terdapat tujuh jenis kebijakan utama, yaitu peningkatan produksi, subsidi, diversifikasi, penguatan kelembagaan dan penyuluhan, pengembangan infrastruktur, perlindungan dan mitigasi risiko, serta peningkatan ekspor dan daya saing.

Implementasi kebijakan pembangunan pertanian belum sepenuhnya berhasil, diperlukan reformasi komprehensif, berkelanjutan, dan memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, serta sosial di pedesaan. Implementasi tersebut harus terfokus dan konsisten melalui pembangunan sektor pertanian dan perdesaan, serta reformasi agraria untuk mengatasi kemiskinan petani akibat sempitnya kepemilikan lahan. Kebijakan harus holistik, berkesinambungan, dan inklusif guna menjamin stabilitas produk pangan dan kemandirian pangan nasional. Pemerintah perlu menyediakan insentif menguntungkan dan proteksi produk pertanian untuk mendukung keberlanjutan produksi serta kesejahteraan petani di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, D. S., Nurdin, M. S., Yasin, I. A., Indrianti, M. A., Mokoginta, M. M., Fahrullah, F., Suparwata, D. O., Gobel, Y. A., Djibrin, M. M., & Mokoolang, S. (2021). A preliminary study on the size structure and sex ratio of orange-spotted grouper (*Epinephelus coioides* Hamilton, 1822) harvested from Kwandang Bay, Sulawesi Sea, Indonesia. Aceh Journal of Animal Science, 6(2), 34–38.
- Ayu, C., Wuryantoro dan Sari, N.M.W. (2024). Kinerja Ekonomi Usahatani Tanaman Pangan dan Kontribusinya terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus

- Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam IPB: Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI), Oktober 2024. Vol. 29 (4): 633 – 641.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI/article/view/46548>
- Azizah, TN. 2009. Menilik Kebijakan Pembangunan Indonesia. Jurnal Borneo Admintrator. <http://www.samarinda.lan.go.id>
- Damanhuri,D.S., Yustika, A.E., Darmawan, A.H., A. Prasetyantoko, Ishak, A., Suyanto, B., Elvawati, E.S., Nofrian, F., Somantri, G.R., Haryono, Kolopaking, L., Jamilah, J., Nurhadi, I., Kari, M.m, Syukur, M., Lenggono,P.S., Rokhani., Sjaf , S., dan Juoro, 2023. NUSANTARAANOMICS: Paradigma Teori dan Pengalaman Empiris (Pendekatan Heterodoks), Penerbit IPB Press, Kota Bogor – Indonesia. 331 H.
- Dumasari. 2020. Pembangunan Pertanian: mendahulukan yang Tertinggal. Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI). Jakarta.158 h.
- FAO (Food and Agriculture Organization). 2015. FAO and 17 Sustainable Goals. <https://www.fao.org/about/strategy-programme-budget/strategic-framework/fao>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022). State of Food Security and Nutrition in the World 2022. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/1c38676f-f5f7-47cf-81b3 f4c9794eba8a/content>
- Fadilah, M.N, 2021. Peran Sektor Pertanian dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Kompasiana, 7 PRIL 2021; 1–3. <https://www.kompasiana.com/fadilfadil7892>
- Harahap, A.H., Rahmanta dan Lindawati. 2022. Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Jurnal AGRO BALI: Agricultural Journal, Vol. 5, No. 1: 76-83, March 2022 <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/Agro/article/view/870>
- Hanafie, R. 2010. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: Penerbit Andi.
- Hazell, P. dan S. Haggblade (1991). “Rural-urban growth linkages in India”. Indian Journal of Agricultural Economics, 46(4): 515-529.
- Mahmudin, 2013. Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala, Vol. 3, No.3, Juni 2013
- Meutia, I.F. 2017. Analisis Kebijakan Publik Penerbit AURA (CV. Anugrah Utama Raharja) Anggota IKAPI. 207 h.
- Mosher, A.T. (1965). Getting Agricultural Moving. Bangkok: Agricultural Development Council.
- Nangameka, Y.,2012. Harapan dan Tantangan Pembangunan Pertanian dalam Era Globalisasi. Jurnal Ilmiah Agri Bios Vol. 10 No. 1: Juni 2012. h. 1- 17. <https://www.neliti.com/id/publications/338220/harapan-dan-tantangan-pembangunan-policy-brief>.
- Policy Brief. 2019. Policy Brief: Permasalahan, Tantangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian: 2020-2024. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Prayoga, K., Nurfadillah, S., Saragih, M., dan A.M. Riezky, 2019. Menakar Perubahan Sosio-Kultural Masyarakat Tani Akibat Miskonsepsi Modernisasi Pembangunan Pertanian. SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. DOI:10.24843/SOCA.2019.v13.i01.p08
- Puji Lestari. (2022). Teknologi Pertanian: Inovasi dan Aplikasinya. In Research Organization for Agriculture and Food (pp. 1–2). Organization for Agriculture and Food.
- Putri, A.M dan Ariusni, 2024. Pengaruh Pendidikan, Output Sektor Pertanian, Dan Upah Pertanian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Di Indonesia. Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP), Desember 2024. 649-654 h. <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/login>

- Quirinno,S.R., Murtiana S, dan Asmor,N.2024. Peran Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Nasional. *Jurnal NUSANTARA*, Vol 11 No 7 Tahun 2024 Hal. : 2811-2822Jurusn Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UM-Tapsel.
- Simatupang Pantjar dan Nizwar Syafa'at. 2000. Industrialisasi Berbasis Pertanian sebagai Grand Strategy Pembangunan Ekonomi Nasional. *Forum Agro Ekonomika Vlume 18*. Nomor 1 dan 2 Desember 200. Jakarta: Puslitbang. Departemen Pertanian
- Sugiyono. 2021. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D (Sutopo, Ed.; 3rd ed., Vol. 2). Afabeta.
- Syam, A dan Noekman,K.M., 2003. Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Penyediaan Lapangan Kerja dan Perbandingannya Dengan Sektor-Sektor lain. *Jurnal Soca*. Vol. 3. No. 1, Februari 2003. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/view/4016>
- Toansiba, M., Katmo, E. T. R., Krisnawati, K., & Wambrauw, Y. L. D. (2021). Pengelolaan Tanah dalam Pengetahuan Lokal dan Praktik Pertanian Berkelanjutan pada Masyarakat Arfak, Papua Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 26(3), 370–378.
- Tranding Economics. 2025. Indonesia: PDB Sektor Pertanian 2010 – 2024. <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-from-agriculture>
- Untari, D. W. 2007. Implementasi prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan oleh petani di Kabupaten Kulon Progo. *Universitas Gadjah Mada*. <http://jurnal.polbangtanyoma.ac.id/index.php/jiip/article/view/316>
- Wardhono, A dan Wibowo R. 2020. Institutional Arrangement Of Agriculture Development in Indonesia: Lesson Learn from Korea through 6 th Order of Industrial Agriculture System. *EDP Sciences*. Vol 142, January 2020. https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/103216/Faperta_Prosidng_A
- Waridin, 2019. Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. 60 h.
- World Bank. 2021. Bank Dunia Dukung Sektor Pertanian Indonesia untuk Menjadi Lebih Tangguh dan Inklusif. <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2022/09/09/>
- World Bank. 2025. Agriculture and Food: Agriculture Overview, Development News, Research, data. <https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/overview>
- Wibowo, A.Y. 2022. Keunggulan Komparatif Pada Produk Perdagangan Kopi, Teh, dan Rempah-Rempah Antara Indonesia Dengan Jepang Pada Periode 2020. *Research Gate*, h.1–11.